

ABSTRAK

AGUSTINA. Gerakan Perlawanan Masyarakat Sipil Dalam Kebijakan Agraria: Studi Penolakan Perpanjangan HGU PTPN XIV Di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Handam, dan Nur Khaerah,).

Penelitian ini membahas Gerakan masyarakat dalam kebijakan agrarian di Polongbangkeng Kabupaten Takalar , dengan fokus pada penolakan perpanjangan HGU PTPN XIV. Masalah agrarian menjadi isu yang kompleks dan sering kali memicu konflik. Salah satu bentuk konflik agraria yang menonjol adalah sengketa lahan akibat tumpang tindih kepentingan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta. Ketimpangan ini sering kali diperparah oleh penguasaan tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan besar

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan analisis dokumen, wawancara mendalam dengan membahas Gerakan masyarakat dalam kebijakan agrarian di Polongbangkeng Kabupaten Takalar , dengan fokus pada penolakan perpanjangan HGU PTPN XIV, serta observasi terhadap konflik yang terjadi di masyarakat.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa gerakan masyarakat Desa Lassang dalam menolak perpanjangan HGU PTPN menunjukkan bentuk nyata dari resistensi masyarakat sipil terhadap ketimpangan dalam kebijakan agraria. Gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat atas hak atas tanah yang selama ini dikuasai oleh perusahaan tanpa memberi manfaat yang signifikan bagi warga setempat. Aksi-aksi protes, konsolidasi komunitas, serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan klaim atas tanah tersebut. Penolakan ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif terhadap kebijakan agraria yang dianggap merugikan dan menunjukkan peningkatan kapasitas warga dalam menjelaskan hak-haknya secara politik dan sosial.

KATA KUNCI : Gerakan Masyarakat Sipil, Kebijakan Agrarian, HGU PTPN, Konflik Agraria

ABSTRAK

AGUSTINA. *Civil Society Resistance Movement in Agrarian Policy: Study of Rejection of Extension of HGU PTPN XIV in North Polongbangkeng, Takalar Regency.* (supervised by Handam, and Nur Khaerah,).

This study discusses the Community Movement in agrarian policy in Polongbangkeng, Takalar Regency, with a focus on the rejection of the extension of HGU PTPN XIV. Agrarian issues are complex issues and often trigger conflicts. One form of prominent agrarian conflict is land disputes due to overlapping interests between local communities, the government, and the private sector. This inequality is often exacerbated by land control through the Right to Cultivate (HGU) granted to large companies

The research method used is a qualitative approach with a case study method, involving document analysis, in-depth interviews by discussing the Community Movement in agrarian policy in Polongbangkeng, Takalar Regency, with a focus on the rejection of the extension of HGU PTPN XIV, and observations of conflicts that occur in the community.

The results of the discussion show that the Lassang Village community movement in rejecting the extension of HGU PTPN shows a real form of civil society resistance to inequality in agrarian policy. This movement was born from the collective awareness of the community over land rights that have been controlled by the company without providing significant benefits to local residents. Protests, community consolidation, and support from civil society organizations have become the main forces in fighting for claims to the land. This rejection reflects that the community is no longer passive towards agrarian policies that are considered detrimental and shows an increase in the capacity of residents to articulate their rights politically and socially.

KEYWORDS: *Civil Society Movement, Agrarian Policy, HGU PTPN, Agrarian Conflict*